

---

**FAKTOR-FAKTOR DALAM UPAYA MENGATASI ABRASI  
DI PESISIR PANTAI DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE****Ransta L. Lekatompessy<sup>1</sup>, Edoardus E. Maturbongs<sup>2</sup>***Abstract*

*Environmental degradations are generally caused by two factors: natural occurrences and human interference. One of the environmental damage is the occurrence of abrasion along the coast. This study aims to describe the factors that need to be considered to overcome coastal abrasion in the Merauke Regency area. The research was conducted in Merauke Regency using primary and secondary data which were then presented in a descriptive qualitative manner. The results of this study indicate that the level of coastal abrasion in Merauke Regency is of great concern. Abrasion not only causes damage to nature but also causes damage to other public facilities such as roads and public housing. To prevent the spread of abrasion, factors supporting prevention efforts are required, including economic, ecological, social, political, and cultural factors. Some of these factors are expected to be a source of concern for decision-makers to make environmental policies to overcome abrasion in Merauke Regency.*

**Keywords:** *Abrasion; Coastal; Beach; Policy.*

**PENDAHULUAN**

Dalam tataran kebijakan publik dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan publik tidak sepenuhnya bebas nilai, artinya bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan setidaknya berangkat dari sistem nilai, pola hidup maupun kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Kebijakan yang paling sering berhadapan dengan sistem nilai adalah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, mengingat pengelolaan lingkungan pada dasarnya akan bermuara kepada berbagai kepentingan yang ikut menyertakan masyarakat adat atau masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat. Berangkat dari hal tersebut diketahui pula setiap langkah kebijakan yang dikeluarkan tentu mengacu pada faktor-faktor pendukung yang juga dapat dikatakan sebagai faktor-faktor kebijakan yang dijadikan indikator untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor kebijakan ini merupakan rangkaian dari setiap masalah publik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Charles O. Jones mengatakan masalah publik dicirikan dalam dua bentuk, yakni yang pertama

---

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Musamus

<sup>2</sup> Prodi Administrasi Publik Program Magister, FISIP, Universitas Musamus

---

masalah-masalah yang ada mempunyai karakteristik yang menjadi perhatian kelompok masyarakat dengan tujuan melakukan suatu tindakan, serta yang kedua setiap masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh individu masyarakat karena kurang terorganisasi dan kurang adanya dukungan (dalam Winarno, 2012: 79).

Masalah-masalah publik cenderung menimbulkan perbedaan dalam proses perumusannya. Jika masalah-masalah publik tersebut menyangkut hak hidup dan kepentingan orang banyak maka penyelesaian lewat kebijakan publik mutlak dilakukan, sedangkan jika masalah-masalah publik tersebut kurang mendapatkan perhatian karena tidak menjadi skala prioritas maka masalah publik tersebut tidak dilanjutkan dalam agenda kebijakan selanjutnya. Berbagai masalah publik terjadi di mana saja serta bisa kapan saja, termasuk di wilayah Kabupaten Merauke tidak terlepas pula dari setiap masalah-masalah publik dalam lingkungan masyarakatnya. Setiap masalah publik hendaknya menjadi perhatian bersama dari semua komponen baik Pemerintah, masyarakat, maupun swasta dengan tujuan menyelesaikan setiap masalah tersebut. Salah satu masalah publik yang cukup menyita perhatian adalah masalah lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan persoalan-persoalan lainnya. Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masalah lingkungan merupakan masalah global saat ini yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan juga faktor kelalaian manusia sebab terkadang manusia dalam aktifitasnya kurang peduli dengan keseimbangan dan keharmonisan lingkungan (Lekatompessy et al., 2019: 1). Faktor lainnya adalah kerusakan lingkungan disebabkan juga oleh dua faktor, yakni faktor alam seperti banjir atau gempa bumi serta faktor kesalahan manusia seperti kebakaran hutan dan sebagainya (Maturbongs dkk, 2017: 2512). Salah satu masalah lingkungan yang sangat menyita perhatian tersebut adalah terjadinya abrasi hampir di semua pesisir pantai di dalam wilayah Kabupaten Merauke, abrasi merupakan salah satu proses yang secara perlahan-lahan akan merusak pantai (Wisyanto, 2019: 24).

Posisi Kabupaten Merauke yang terletak dipinggir laut memiliki garis pantai yang cukup panjang. Dengan posisi tersebut menjadikan Kabupaten Merauke sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil perikanan yang sangat baik di wilayah Papua. Di Sisi wilayah pantai yang terdapat di Kabupaten Merauke dijadikan pula sebagai salah satu sumber ekonomi sebagian masyarakat dengan melakukan aktifitas penggalan pasir

---

pantai untuk dijual. Aktifitas ini secara tidak langsung ikut merubah garis pantai dan menyebabkan terjadinya abrasi hampir di sebagian pantai di Kabupaten Merauke. Letak Kabupaten Merauke pada wilayah pesisir memiliki dampak tersendiri, disebutkan bahwa pada wilayah pesisir rentan terkena dampak dari adanya perubahan iklim sehingga diperlukan upaya tertentu guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan lebih lanjut pada wilayah tersebut (Sanjoto dkk, 2016: 91). Untuk mengatasi persoalan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengatasi terjadinya abrasi di pesisir pantai dalam wilayah Kabupaten Merauke.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di Kabupaten Merauke dengan fokus pada zona pesisir pantai yang mengalami abrasi. Untuk mendukung penelitian ini maka data penelitian bersumber dari:

1. Data primer

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi, yakni perhatian yang berfokus pada kejadian, gejala atau sesuatu hal (Emzir, 2012: 37–38). Observasi dilakukan terhadap lokasi yang menjadi fokus penelitian, yakni pesisir pantai mulai dari Distrik Naukenjerai hingga Distrik Malind di Kabupaten Merauke.

2. Data sekunder

Merupakan data pendukung penelitian yang bersumber dari literatur yang menurut Bungin adalah bahan-bahan yang diterbitkan baik diterbitkan secara rutin maupun secara berkala (Bungin, 2014: 125). Literatur yang digunakan adalah literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Abrasi di Kabupaten Merauke**

Persoalan abrasi merupakan persoalan yang dialami di hampir semua wilayah pesisir pantai, tidak terkecuali di Kabupaten Merauke dan juga di wilayah Papua lainnya. Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah administratif pemerintahan dalam wilayah Provinsi Papua terletak pada posisi antara 1370-1410 Bujur Timur dan 50-90

Lintang Selatan, dengan memiliki luas wilayah 46.791,63 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik, 2021, p. 4), terletak dibagian selatan Provinsi Papua menempatkan Kabupaten Merauke berada dipinggir laut tepatnya langsung berbatasan dengan laut Arafura pada bagian barat dan selatan.

Tingkat abrasi di Kabupaten Merauke bahkan semakin tinggi dari tahun ke tahun di beberapa wilayah, hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Secara umum abrasi disebabkan karena dua faktor, yakni pertama karena faktor alam yang terjadi secara alamiah, kedua adalah faktor yang disebabkan oleh sebagian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan baik sehingga ketika air laut pasang akan menyebabkan terjadinya abrasi. Faktor ke dua inilah yang cukup banyak terjadi di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke, di mana terjadi aktifitas penggalian pasir oleh sebagian masyarakat sebagai pemilik ulayat untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Gambar 1.**  
**Abrasi di wilayah Distrik Naukenjerai dan Distrik Merauke**



Sumber : data primer peneliti

Dalam perspektif filosofis menurut Fauzi (2014) yang berkaitan dengan tipe pandangan manusia akan eksternalitas dan alam yang terkesan reduksionis, yakni pandangan *individualist* yang melihat alam sebagai suatu sistem yang secara otomatis dapat pulih kembali dari kerusakan serta kembali kepada keseimbangan (dalam Widiastuti dkk, 2018: 28). Pandangan *individualist* inilah yang cenderung menyebabkan masyarakat tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kelak karena hal yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pola hidup yang bergantung pada sumber daya alam ini yang harus diubah karena akan

menjadi bumerang bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Di satu sisi alam menyediakan semua kebutuhannya namun di satu sisi eksploitasi alam yang berlebihan justru akan meninggalkan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Penyebab terjadinya abrasi menurut penelitian terdahulu menyebutkan bahwa abrasi terjadi jika jumlah sedimen yang diangkut oleh laut jumlahnya lebih besar dari jumlah sedimen yang diendapkan sehingga dengan demikian hal tersebut menyebabkan garis pantai akan menjadi semakin mundur (Suyono dkk, 2015: 97). Abrasi akan menyebabkan terjadinya kemunduran posisi garis pantai dari kedudukan semula (mengarah ke darat) (Istijono, 2013: 46). Tingkat Abrasi ini secara langsung ikut merubah garis pantai dan lingkungan sekitarnya yang berakibat hilangnya pepohonan, rusaknya pemukiman warga, rusaknya akses publik seperti jalan dan jembatan serta menyebabkan kerugian secara material. Dalam pandangan Carter (1993) menyebutkan bahwa perubahan pada garis pantai sangat dipengaruhi pula oleh berbagai proses-proses yang terjadi disekitar pantai, sehingga pantai akan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang terjadi (dalam Veranita & Pamungkas, 2013: 114). Tingkat abrasi di pesisir pantai dalam wilayah Kabupaten Merauke sudah sangat memprihatinkan, bahkan pada wilayah tertentu akses jalan penghubung antar kampung sudah terputus, rusaknya bangunan rumah warga di sekitarnya, rusaknya fasilitas rumah ibadah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terjadi akibat pengaruh abrasi.

### **Gambar 2.**

#### **Abrasi yang merusak jalan penghubung antara Distrik Semangga dan Distrik Malind**



Sumber : data primer peneliti.

---

Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke ikut mengubah garis pantai yang semakin mengarah ke daratan, sejumlah pohon khas seperti kelapa yang tumbuh di sekitar pantai pun ikut lenyap terbawa arus laut. Karakteristik wilayah Kabupaten Merauke yang berdataran rendah dan rawa-rawa tentu sangat riskan jika abrasi terus terjadi, dikhawatirkan volume air laut yang terbawa akibat air pasang akan menyebabkan terjadinya intrusi atau merembesnya air laut kedalam lapisan tanah sehingga terjadinya pencampuran air laut dengan air tanah terutama pada zona kebutuhan air masyarakat seperti di kampung Rawa Biru atau pada sumur-sumur warga yang dapat menyebabkan terjadinya air payau.

## **2. Analisis Faktor-Faktor Kebijakan Dalam Upaya Pencegahan Abrasi**

Dalam konteks kebijakan publik tidak terlepas dari faktor-faktor kebijakan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangannya disebutkan bahwa teori sistem berpendapat dalam penyusunan atau pembuatan suatu kebijakan publik tidak ada terlepas dari pengaruh lingkungan (Subarsono, 2009, p. 14). Pandangan teori sistem ini memberikan arah kejelasan bahwa semua faktor-faktor yang mendukung lahirnya suatu kebijakan publik hendaknya melihat aspek lingkungan darimana isu kebijakan itu muncul. Sejalan dengan itu menurut Hadi (2006), Serageldin (1993), Munangsinghe (1992) dan World Bank (2003) (dalam Kismartini & Bungin, 2019: 144) bahwa implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dalam perspektif *sustainable development* setidaknya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang turut menunjang tiga dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi ekologi serta dimensi sosial. Lebih lanjut selain ketiga dimensi tersebut ditambahkan pula dimensi lain yang ikut berpengaruh dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni dimensi politik (Kismartini & Bungin, 2019: 145). Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pantai yang terkena dampak abrasi perlu dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang dilandasi dengan situasi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (Istijono, 2013: 49). Kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan menetap dalam kawasan pesisir pantai mau tidak mau ikut mempengaruhi pola hidup masyarakat dan secara tidak langsung pola hidup tersebut ikut mempengaruhi terjadinya abrasi seperti mengeruk pasir pantai untuk dijual atau sebagaimana terjadi pada wilayah pesisir pantai di beberapa distrik di Kabupaten Merauke. Terhadap berbagai faktor-faktor

sebagaimana dikemukakan di atas selanjutnya dijelaskan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masih menjadi faktor dominan ketika terjadi eksploitasi lingkungan di wilayah pesisir, hal ini disebut sebagai faktor ekonomi manusia yang sangat dominan namun hanya sesaat menyebabkan upaya untuk merehabilitasi lingkungan sulit terjadi dan bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah (Akbar, Sartohadi, Djohan, & Ritohardoyo, 2017, p. 8). Faktor ekonomi tidak selamanya harus dijadikan alasan dalam mengeksploitasi alam. Agar faktor ini dapat berkurang maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Dinas terkait harus melakukan pembinaan dan pendampingan ekonomi kreatif kepada masyarakat di wilayah pesisir pantai;
2. Program pendampingan harus dilakukan secara konsisten dan kontinu.

Masalah utama dari ketergantungan terhadap alam adalah masalah keterampilan dalam mengelolah hasil-hasil alam menjadi bahan yang dapat dikonsumsi jangka panjang dan bahkan didistribusi, peran berbagai *stakeholder* dalam meningkatkan ketrampilan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan.

b) Faktor Ekologi

Faktor ekologi berkaitan dengan karakteristik lingkungan pada wilayah-wilayah sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Merauke. Zona ekologi yang membentang sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Merauke perlu didukung dengan penelitian lebih mendalam terutama untuk mengetahui karakteristik wilayah dalam upaya penanaman mangrove pada wilayah-wilayah tertentu di sepanjang pesisir pantai. Dalam upaya mencegah terjadinya abrasi khususnya di Pantai Payum, Pantai Buti hingga Pantai Lampu Satu telah dilakukan penanaman mangrove dari berbagai elemen masyarakat, namun upaya ini terkadang tidak sepenuhnya berhasil karena gempuran gelombang air pasang yang menyeret mangrove yang telah ditanam sebelumnya.

**Gambar 3.**  
**Zona mangrove di Pantai Payum Distrik Merauke**



Sumber : data primer peneliti.

Faktor ekologi yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlunya kajian dan penelitian mendalam mengenai karakter mangrove yang cocok dengan kondisi daerah pesisir pantai terutama di wilayah Kabupaten Merauke;
2. Penanaman mangrove perlu dilakukan dengan memperhatikan cuaca atau kondisi alam, sebaiknya ditanam pada musim-musim tertentu di mana gelombang laut atau air pasang tidak menjadi penghalang;
3. Pengawasan dan pemeliharaan terhadap mangrove yang di Kawasan pesisir pantai.

Penelitian terhadap wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke penting untuk dilakukan, sebab menanam mangrove tanpa memperhatikan kesesuaian wilayah tentu akan menimbulkan hal yang sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian lain bahwa sebelum dilakukan proses penanaman pohon mangrove perlu diberlakukan kajian terhadap tipologi tanah guna mengetahui tingkat kecocokan jenis tanaman yang akan ditanam (Wisyanto, 2019: 29).

c) Faktor Sosial

Faktor sosial dalam konteks pengelolaan lingkungan dikaitkan dengan tingkat kepedulian sosial masyarakat akan alam sekitarnya, semakin tinggi kepedulian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam maka tentu saja akan semakin tinggi usaha menjaga kestabilan lingkungan. Dalam upaya mencegah abrasi, diperlukan perhatian dan kepedulian dari semua *stakeholder* untuk mencegah terjadinya abrasi yang semakin parah lewat partisipasi masyarakat. Faktor sosial salah satunya dilihat dari bagaimana tingkat partisipasi publik, sebab partisipasi publik dalam proses pembangunan tentu menjadi



---

salah satu faktor yang penting.

Semakin tinggi tingkat partisipasi dari berbagai *stakeholder* dalam mendukung upaya pembangunan tentu akan semakin arah pembangunan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan program tentu tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari berbagai *stakeholder*. Pengelolaan lingkungan khususnya wilayah pesisir dari ancaman abrasi tentu membutuhkan mitra atau *stakeholder* lainnya, sebagaimana pandangan yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mendukung proses penyusunan agenda kebijakan, yakni adanya partisipasi masyarakat (Rakhmat, 2009: 135). Hal lain adalah dengan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi akan timbul pemikiran masyarakat bahwa pemerintah tidak menipu, pemerintah dekat dengan masyarakat dan pemerintah semakin dipercaya (Keban, 2014: 83).

d) Faktor Politik

Dukungan politik merupakan faktor yang tidak kalah penting, sebab dalam pengelolaan hasil-hasil alam faktor politik ikut andil dalam menentukan langkah kebijakan. Faktor politik tidak dapat begitu saja diabaikan, sebab dalam menentukan arah kebijakan khususnya dalam pengelolaan lingkungan diperlukan stabilitas politik yang baik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Faktor politik yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah abrasi, yaitu:

1. Perlunya rekomendasi kebijakan dari berbagai *stakeholder* untuk pelestarian kawasan pesisir dari adanya upaya-upaya yang mengarah pada kerusakan lingkungan. Dalam pandangan Bertens (2004) menyebutkan masalah kerusakan lingkungan tidak terjadi dengan sendiri namun ada tindakan lain yang dilakukan oleh manusia (Samderubun & Maturbongs, 2014: 69) maka dibutuhkan perhatian dari semua *stakeholder* untuk masalah-masalah lingkungan.
2. Alokasi kebijakan anggaran yang diperuntukan bagi pengelolaan wilayah pesisir dari ancaman abrasi.

Faktor politik sangat penting dalam menentukan langkah kebijakan yang akan diambil, sebab melihat abrasi yang semakin mengancam wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke sudah selayaknya setiap komponen yang terlibat dalam pembangunan harus mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

---

e) Faktor Budaya

Faktor budaya masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam konteks kehidupan masyarakat pemilik ulayat di Kabupaten Merauke. Kekuatan budaya secara turun temurun, kekuatan hubungan keluarga, kekuatan kelas sosial dan kekuatan kelompok keanggotaan (Fitriani et al., 2018, p. 204) menjadi faktor pendukung yang patut dikemukakan. Kecintaan dan penghormatan terhadap adat budaya hendaknya menjadi modal penting bagi pemerintah sebagai salah satu faktor dalam menentukan langkah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dari abrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari faktor budaya antara lain:

1. Lembaga adat sebagai ujung tombak budaya harus diberikan peran dalam menjaga dan melestarikan wilayah pesisir. Hal ini sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keikutsertaan masyarakat hukum adat melalui lembaga masyarakat adat (LMA) merupakan dalam rangka memelihara kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat (Maturbongs & Lekatompessy, 2020: 63).
2. Menanamkan dan menumbuhkan aspek nilai-nilai budaya kepada generasi muda sedini mungkin terutama nilai budaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang dalam praktek kehidupan masyarakat masih tumbuh berkembang;
3. Pemerintah dan lembaga masyarakat adat perlu mendorong adanya kebijakan berbasis adat budaya guna mencegah terjadinya transaksi jual beli tanah pada wilayah-wilayah pesisir pantai maupun kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan berbasis adat budaya setempat.

Faktor-faktor pendukung guna mencegah terjadinya abrasi di Kabupaten Merauke sebagaimana dikemukakan di atas merupakan merupakan faktor-faktor yang sering ditemui secara langsung di lapangan. Dengan memperhatikan hal dimaksud selanjutnya faktor-faktor tersebut perlu dikelola dan diatur sedemikian rupa melibatkan berbagai *stakeholder* yang memahami dengan baik kondisi di wilayah pesisir. Diharapkan faktor-faktor dimaksud dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kendali pembangunan guna melahirkan kebijakan-kebijakan lingkungan dalam hal ini kebijakan yang mengarah pada pencegahan abrasi di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Merauke.

---

**KESIMPULAN**

Abrasi terjadi di Kabupaten Merauke terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan akibat ulah manusia yang melakukan eksploitasi alam di sekitar pantai dengan melakukan penggalian pasir. Tingkat abrasi di Kabupaten Merauke sendiri sudah termasuk memprihatinkan di beberapa wilayah yang berakibat pada rusaknya lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya abrasi yang semakin parah maka diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak yang akan timbul akibat abrasi pada wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke. Beberapa faktor-faktor pendukung dapat dikedepankan untuk didorong menjadi agenda kebijakan Pemerintah, antara lain; 1) faktor ekonomi, 2) faktor ekologi, 3) faktor sosial, 4) faktor politik dan 5) faktor budaya. Dalam perjalanannya diharapkan kebijakan lingkungan menyangkut pengendalian abrasi pantai hendaknya memperhatikan faktor-faktor pendukung tersebut agar masyarakat yang telah menetap dan mempunyai hak ulayat di wilayah pesisir pantai dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan serta pencegahan abrasi pantai di Kabupaten Merauke, sebab untuk mengatasi persoalan abrasi tersebut dan menjaga agar lingkungan tetap asri dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. A., Sartohadi, J., Djohan, T. S., & Ritohardoyo, S. (2017). Erosi Pantai, Ekosistem Hutan Bakau dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kerusakan Pantai Di negara Tropis (Coastal Erosion, Mangrove Ecosystems and Community Adaptation to Coastal Disasters in Tropical Countries). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/jil.15.1.1-10>
- Badan Pusat Statistik, K. M. (2021). *Kabupaten Merauke Dalam Angka 2021*. Merauke.
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Kedua). Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, Betaubun, P., Pure, E. A. G., Tikson, D., Maturbongs, E. E., Cahyanti, T. W. A., & Waas, R. F. (2018). Relationship of Employee Ethnic Background in Validation of Situational Leadership Theory. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(4), 200–205. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00283.8>

- Istijono, B. (2013). Tinjauan Lingkungan Dan Penanggulangan Abrasi Pantai Padang - Sumatera Barat. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 9(2), 42–49. <https://doi.org/10.25077/jrs.9.2.42-49.2013>
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu* (Ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
- Kismartini, & Bungin, B. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia. Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lekatompessy, R. L., Maturbongs, E. E., Betaubun, K., Teturan, Y. E., Jeujanen, W., & Antonio, L. (2019). Mitigation approach in preventing environmental destruction continuity in Merauke Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012050>
- Maturbongs, E.E., Cahyanti, T. W. A., & Fitriani. (2017). Management and Environmental Conservation Based on Local Wisdom. *Advanced Science Letters*, 23(3), 2512–2514. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8661>
- Maturbongs, Edoardus E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Rakhmat. (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Samderubun, G., & Maturbongs, E. E. (2014). Krisis Lingkungan Antara Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dan Etika Lingkungan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 3(1), 63–79.
- Sanjoto, T. B., Sunarko, & Parman, S. (2016). Tanggap Diri Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Erosi Pantai (Studi Kasus Masyarakat Desa Bedono Kabupaten Demak). *Jurnal Geografi*, 13(1), 90–100. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511712029>
- Subarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyono, Supriharyono, Hendrarto, B., & Radjasa, O. K. (2015). Pemetaan Degradasi Ekosistem Mangrove dan Abrasi Pantai Berbasis Geographic Information System di Kabupaten Brebes-Jawa Tengah. *Oceatek*, 9(01), 90–102.
- Veranita, H. U., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi Kawasan Rentan Terhadap Abrasi di Pesisir Kabupaten Tuban. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(2), 114–117. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/155150-ID-identifikasi-kawasan-rentan-terhadap-abr.pdf>
- Widiastuti, M. M. D., Samderubun, G., & Arifin, T. (2018). Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai Melalui Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus Penggalian Pasir di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6850>

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. (T. R. CAPS, Ed.) (Edisi dan). Yogyakarta: CAPS.

Wisyanto. (2019). Analisis Bahaya Abrasi di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. *Alami*, 3(1), 21–31.